



Jumlah Mobil Melonjak 3 Kali Lipat Setahun

Survei Inrix: Yogyakarta Kota Termacet Ke-4 di Indonesia

YOGYA, TRIBUN - Menurut survei riset Inrix, Yogyakarta menduduki peringkat 4 daftar 10 kota paling macet di Indonesia. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Made Golkari Yulianto mengatakan bahwa hasil survei tersebut menjadi peringatan bagi Dinas Perhubungan.

"Survei dasarnya apa kan kita nggak tahu. Tetapi itu merupakan warning bagi Dinas Perhubungan. Karena kami punya tanggung jawab di situ," kata Made Golkari saat ditemui Tribun Jogja di kantornya, belum lama ini.

Made mengatakan, per-

tumbuhan kendaraan di Yogyakarta meningkat drastis. Menurut data Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, jumlah kendaraan roda dua tahun 2016 sejumlah 71.566. Tahun 2017 meningkat 211 persen menjadi 222.915. Sementara untuk kendaraan

roda empat, tahun 2016 sejumlah 12.746. Tahun 2017 meningkat 344 persen menjadi 56.647

"Berapa persen itu kenalkannya. Ya kalau dikatakan macet, bisa jadi. Kendaraan tambah banyak, sementara lebar dan panjang jalan tidak berkembang."

● ke halaman 19



Survei dasarnya apa kan kita nggak tahu. Tetapi itu merupakan warning bagi Dinas Perhubungan. Karena kami punya tanggung jawab di situ.

Made Golkari Yulianto
Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Jumlah Mobil

● Sambungan Hal 13

lanjut Made.

Untuk itu, Dinas Perhubungan sudah melakukan manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas terkait dengan pemberlakuan jalan satu arah dan rekayasa lalu lintas. Selain itu juga memasang rambu-rambu lalu lintas.

"Kami sudah lakukan manajemen lalu lintas, membuat garis bahu-bahu di beberapa tempat, supaya tidak parkir sembarangan. Lalu kita lakukan normalisasi simpang," kata Made.

Ia mengimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Menurutnya pelanggaran yang dilakukan masyarakat bisa menghambat lalu lintas.

"Masyarakat juga harus mematuhi peraturan yang ada. Misalnya bahu-bahu, tidak boleh parkir, ya jangan parkir," imbuh Made.

Made juga mengajak masyarakat untuk mengguna-

kan kendaraan umum yang sudah disediakan.

"Kan sudah ada angkutan umum, ya mari kita gunakan. Kalau mobil cuma dipakai sendiri kan menenuhi juga itu," katanya.

"Kita optimis dan buat sesuatu untuk masyarakat. Tetapi juga butuh dukungan masyarakat juga, melalui hal sederhana, tidak parkir sembarangan, taat rambu lalu lintas. Dan juga kesiapan masyarakat untuk menaati peraturanlah," katanya.

Masih wajar

Meski begitu, Made Golkar Yulianto mengatakan kemacetan di Yogyakarta sebenarnya masih dapat dikatakan wajar. Ia mengatakan macet atau tidak tergantung pengertiannya.

Jika macet diartikan sebagai lalu lintas terhenti, maka Yogyakarta tidak macet. Made menambahkan dalam kondisi puncak masyarakat masih bisa berjalan 22 km/jam. Meskipun tidak tinggi, namun lalu lintas masih berjalan.

"Kalau wilayah perkotaan

22 km/jam ya masih wajar. Dalam kondisi puncak lho itu. Artinya kan nggak macet," kata Made.

Made mengatakan, meskipun kecepatan tidak terlalu tinggi, namun lalu lintas tidak terhenti. Ia mengatakan, potensi kemacetan meningkat, jika volume kendaraan juga meningkat.

"Jadi ada VCR (Volume Capacity Ratio, itu perbandingan volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Jadi kalau VC Ratio tinggi, potensi kemacetan juga tinggi," lanjut Made.

Ia mengatakan ada beberapa jalan di Yogyakarta yang memiliki VC Ratio tinggi, seperti Jalan Jenderal Sudirman, Tugu Pal Putih, hingga Simpang Empat Jetis. Sehingga jika ada hambatan sedikit akan menimbulkan antrean kendaraan yang panjang.

"VC Rationya tinggi itu di sana, misal mencapai 0,9 malah kalau yang dari Tugu sampai Jetis itu bisa 1 pada jam tertentu," lanjut Made.

Lalu lintas dikatakan lan-

car, jika VC Rationya kurang dari 0,8. VC Ratio tinggi juga bisa disebabkan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran. Made mengatakan VC Ratio di jalan Sutomo bisa mencapai 0,9 karena ada masyarakat yang parkir sembarangan dan memutar arah sembarangan. hal itu mengakibatkan terjadi penumpukan di fly over.

"Kalau volume kendaraan tinggi, ya kita bisa melakukan penyesuaian lampu lalu lintas di simpang. Misalnya lampu hijau tadinya 30 detik, oh ternyata ada antrean panjang, bisa ditambah jadi 50 detik," kata Made.

Dinas Perhubungan memiliki smart traffic memanfaatkan teknologi informasi, yaitu Area Traffic Control System (ATCS). Dinas Perhubungan bisa memantau kepadatan lalu lintas melalui CCTV yang sudah di pasang di beberapa simpang. Jika terjadi kepadatan lalu lintas, maka Dinas Perhubungan bisa langsung mengubah durasi lampu lalu lintas tersebut. (tim kota)

Saatnya Gunakan Trans Jogja

GUNA mengurangi kemacetan, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Made Golkari Yulianto meminta masyarakat ke-

luar dari kendaraan pribadi dan menggunakan Trans Jogja yang sudah ada.

● ke halaman 19

Saatnya Gunakan

● Sambungan Hal 13

"LRT kan masih lama, pakai aja Trans Jogja. Nggak perlu nunggu nanti, sekarang bisa. Cuma bayar Rp3.500, masyarakat udah bisa keliling Jogja, dari Jombor sampai Prambanan," lanjut Made.

Ia mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan pengembangan, baik kualitas maupun kuantitas supaya bisa digunakan lebih banyak orang.

Terkait dengan wacana pengadaan Light Rail Transit (LRT), Made sependapat dengan hal tersebut. Menurutnya pembuatan LRT yang merupakan angkutan umum massal berbasis rel tersebut bisa menjadi solusi kemacetan. Namun demikian perlu ada kajian-kajian yang dilakukan mengingat wilayah Yogyakarta yang kecil.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Sigit Sapto

Raharjo, mengatakan LRT dibutuhkan Yogyakarta untuk mengatasi kepadatan lalu lintas. Dengan kata lain, dibutuhkan lebih banyak opsi transportasi umum untuk masyarakat.

Berdasar data dari Dishub DIY, dalam setiap tahunnya, terdapat tambahan 140-150 ribu kendaraan bermotor, baik roda dua, maupun roda empat di Yogyakarta. Akibatnya, kemacetan seringkali terjadi di sejumlah titik, terutama saat jam pergi dan pulang kantor, atau sekolah.

Parahnya lagi, kemacetan semakin dirasakan saat memasuki masa liburan, atau long weekend, lantaran Yogyakarta menjadi salah satu destinasi favorit pariwisata. Selain itu, Yogyakarta juga menjadi jalur perlintasan menuju daerah sekitar.

"LRT ini menjadi salah satu jalan keluar dari deadlock kemacetan, yang bisa saja terjadi di Yogyakarta pada 2025. Menurut

saya, ini urgent sekali, untuk mengatasi kemacetan," ujarnya belum lama ini.

Tak lama

Merujuk dari langkah study dan analisis bisnis yang mulai dilakukan tahun ini, upaya realisasi LRT oleh Pemda DIY in bukan wacana belaka. Sigit menuturkan, kalau proyek yang menelan dana sekitar Rp2,5 Triliun itu, belum akan terwujud dalam waktu dekat.

"Masih jangka panjang, butuh perencanaan matang. Tahun ini masih dalam tahap studi perencanaan, business plan. Tahun depan, kita bikin DED (Detailed Engineering Design). Baru kemudian kami tawarkan skema pembiayaannya. Sekarang kita belum sampai di situ," tuturnya.

Sigit menjelaskan, nantinya LRT akan menjadi penghubung wilayah Sleman-Kota Yogyakarta-Bantul-Kulonprogo, dengan titik akhir di Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Lanjutnya, jalur

LRT yang akan dibangun itu, panjang totalnya mencapai 75 kilometer.

"Kita manfaatkan jalur kereta api yang sudah ada. Tapi, ada yang melayang. Di dalam studi, dari Tempel ke Kota, sampai ke selatan sedikit, wilayah Bantul, akan melayang. Karena memang sudah padat, biar aktivitas warga tidak terganggu, minimalisir pembebasan lahan juga," jelasnya.

Selain menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurai kemacetan di jalanan Yogyakarta, Sigit berujar, bahwa realisasi LRT tersebut, sekaligus menjadi sarana transportasi penunjang, atau alternatif, menuju NYIA, yang tidak lama lagi bakal mulai beroperasi.

"Jalurnya kan dari Tempel ke Srandakan, terus nanti bertemu dengan jalur yang Parangtritis ke NYIA. Jadi, jalurnya nanti ketemu di sana dan bisa membantu, untuk menunjang bandara baru," katanya. **(tim kota)**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Perhubungan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005